

Judul : Bansos beras ada lagi, data penerima kudu akurat
Tanggal : Minggu, 30 Juli 2023
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 6

Bansos Beras Ada Lagi

Data Penerima Kudu Akurat Lho Ya...

ANGGOTA Komisi IV DPR Daniel Johan mendukung program tambahan bantuan pangan beras kepada masyarakat yang berpendapatan rendah atau miskin pada akhir tahun ini. Pemerintah pun diingatkan akan pentingnya keakuratan data Keluarga Penerima Manfaat (KPM) agar bansos tersebut tepat sasaran.

"Penambahan bansos beras akan mengurangi kesulitan masyarakat, terutama karena harga beberapa bahan pokok masih tinggi. Bansos ini merupakan hak rakyat kecil. Jangan sampai

program yang ditujukan untuk menjaga pemenuhan kebutuhan pangan untuk masyarakat berpendapatan rendah tidak tepat sasaran," ungkap Daniel di Jakarta, kemarin.

Diketahui, penyaluran tambahan bansos beras dengan total Rp 8 triliun ini akan diberikan kepada 21,35 juta KPM. Nantinya, setiap KPM akan menerima bantuan beras yang disalurkan selama tiga bulan yakni Oktober, November dan Desember 2023, seperti sebelumnya dari Mei sampai Juli 2023.

Penerima manfaat akan mendapatkan beras sebanyak 10 kg per setiap penyaluran. Daniel pun mengingatkan pentingnya validasi data KPM untuk menghindari kecurangan dalam proses distribusi bansos. "Data penerima bantuan harus akurat untuk menghindari potensi kecurangan," tegasnya.

Politisi Fraksi PKB menyoroti persoalan yang kerap muncul saat penyaluran Bansos, yakni data penerima manfaat yang tidak terbarui. Oleh karena itu, ia mendorong adanya pemba-

haruan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) milik Kementerian Sosial (Kemensos), agar bansos beras ini bisa diterima langsung oleh masyarakat yang dituju dalam program.

"Kurangnya validasi dan data yang tidak *update* sering kali menimbulkan permasalahan.

Maka verifikasi data juga menjadi penting agar bansos ini betul-betul sampai kepada masyarakat yang membutuhkan," sebut Daniel.

Daniel meminta Pemerintah mengawasi betul persoalan

DTKS ini. Sebab, banyak masalah yang muncul di antaranya NIK yang tidak valid, NIK ganda, orang yang sudah meninggal maupun pindah masih tercatat, hingga ketidaksesuaian data antara Dukcapil Kabupaten/Kota dengan Dukcapil Kemendagri.

"Harapannya DTKS sudah tervalidasi sehingga program bisa tepat sasaran. Sebab, banyak kasus ketidaktepatan sasaran berujung pada konflik sehingga perlu dipastikan bahwa DTKS adalah yang benar-benar *update*," tuturnya. ■ KAL